

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kelompok Tani

1. Pengertian Kelompok Tani

Pemerintah membentuk kelompok tani sebagai bagian dari program yang dimaksudkan untuk membantu petani dalam menjalankan usahanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMETAN/SM.050/12/2016 yang menjelaskan bahwa kelompok tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.¹ Purwanto berpendapat bahwa kelompok tani adalah komunitas petani dan nelayan yang dilandaskan oleh kesamaan, keselarasan dalam satu lingkungan untuk dapat menggapai tujuan yang sama.² Dapat dikatakan kelompok tani merupakan manusia yang berkumpul dalam satu kegiatan yang sama yaitu bercocok tanam di sebuah desa.

Dengan adanya pembentukan kelompok tani merupakan suatu wujud usaha untuk para petani agar dapat melakukan kerja sama dan saling berbagi informasi untuk mempermudah dalam melakukan penerapan teknologi. Kelompok tani juga akan membantu meningkatkan pertanian,

¹Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMETAN/SM.050/12/2016.

²Kiswanto, *Menggerakan Kelompok Tani Mandiri* (Yogyakarta: Penerbit Rubrik, 2018), 13.

jika di suatu daerah pertaniannya meningkat maka perekonomian di daerah tersebut juga akan meningkat. Program dari kelompok tani akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan para petani sehingga petani dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Ciri-Ciri Kelompok Tani

Kelompok tani adalah organisasi dipedesaan yang dikembangkan petani dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menghabiskan waktu bersama untuk saling mengenal dan percaya dengan sesama anggota kelompok.
- b. Memiliki pendapat dan keinginan yang sama dibidang pertanian.
- c. Memiliki tradisi dan tempat tinggal, bidang pekerjaan, dan status sosial ekonomi yang sama.
- d. Memiliki peran dan tanggung jawab yang disepakati untuk semua anggota kelompok.³

3. Tujuan Kelompok Tani

Kelompok tani dibentuk bertujuan untuk membekali petani untuk meningkatkan kemampuan petani dalam proses pembangunan. Produktivitas yang terus meningkat merupakan indikasi pertanian yang lebih baik karena akan meningkatkan pendapatan petani dan terciptanya kesejahteraan keluarga mereka. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih beranggapan bahwa kelompok tani masih belum berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Diharapkan agar

³Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk, *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah* (Medan: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 73.

kelompok tani dapat diberikan pembinaan yang lebih efektif dan terarah oleh penyuluh sehingga mampu menjalankan perannya dengan lebih baik.⁴

4. Peran Kelompok Tani

Kelompok tani memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Kelas belajar

Kelas belajar merupakan tempat untuk saling belajar dan memberikan informasi bagi anggota kelompok guna untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang bertani. Kelas belajar yang dilakukan dalam pertemuan rutin akan memberikan tempat untuk anggota kelompok tani agar aktif melakukan diskusi mengenai masalah yang dihadapi dalam pertanian. Hasil materi dari kelas belajar nantinya akan digunakan untuk penyuluhan dan pelatihan bagi petani.

b. Wadah kerjasama

Wadah kerjasama akan memperkuat kerjasama antar anggota kelompok tani dan juga dari pihak lain guna agar mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan melakukan kerjasama maka akan menumbuhkan kekompakan anggota kelompok. Kelompok tani akan bekerjasama dengan pemerintah maupun penyuluh agar dapat membantu dalam usaha taninya, seperti mendapatkan bibit dan pupuk yang bagus serta cara perawatan pada padi.

c. Unit produksi

Usaha tani merupakan kesatuan usaha untuk tetap meningkatkan kualitas dan kuantitas agar dapat meningkatkan skalanya secara ekonomi

⁴Mohamad Ikbal, "Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, *e-J Agrotekbis* 2 No.5 (2014), 506.

maka kelompok tani dapat menjadi unit produksi yang akan menyediakan fasilitas alat dan mesin untuk menunjang kegiatan produksi.⁵

Perkembangan pada kelompok tani dapat dilihat dari terbentuknya kelompok tani atas dasar kepentingan dan tujuan bersama dalam suatu lingkungan. Kelompok tani memiliki peranan yang penting dalam kegiatan pertanian seperti wadah informasi dan kerja sama antar anggota untuk menemukan solusi atas masalah yang ada. Agar kelompok tani dapat berkembang dengan baik maka dibutuhkan pembinaan dan juga pemberdayaan yang lebih lanjut.⁶

5. Badan Hukum

Sesudah terbentuk kelompok tani maka harus dibuatkan Badan Hukum agar kelompok memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan Badan Hukum, organisasi dapat mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah cara untuk pengajuan Badan Hukum:

- a. Kelompok mempunyai struktur organisasi serta dilengkapi dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- b. Kelompok didirikan dengan Akta Notaris;
- c. Akta pendirian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Diumumkan di Berita Acara Negara Republik Indonesia;
- e. Didaftarkan di Panitera Pengadilan

⁵Rahmat Supu, Yanti Saleh, Yuliana Bakari, "Peran Kelompok Tani Padi Sawah Di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango", *Agrinesia* 6 No. 3 (2022), 167.

⁶Pamertan, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan* (Jakarta: Departemen Pertanian RI, 2015), 3.

Kelompok memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan AD dan ART seperti dalam point a. Sementara notaris memiliki tanggung jawab dan melakukan tugas pada point b sampai e. Setelah AD dan ART ditetapkan, langkah selanjutnya kelompok dapat menghubungi notaris untuk menyelesaikan dokumen yang diperlukan dan secara resmi mempunyai badan hukum.⁷

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah standar sosial untuk menentukan apakah suatu masyarakat sedang berada pada kondisi sejahtera atau kondisi prasejahtera. Kesejahteraan juga dapat merujuk pada tingkat kenyamanan material yang setingkat lebih terpenuhi kebutuhannya daripada kehidupan yang sebelumnya. Ketika seseorang merasa puas dengan hidupnya, memiliki semua yang dibutuhkan, serta tidak menghadapi bahaya yang mengancam berarti sudah menganggap dirinya sejahtera.

Kesejahteraan juga diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang meliputi rasa keamanan dan nyaman lahir dan batin. Dengan menjaga hak asasi manusia dan kewajiban sesuai dengan Pancasila, warga negara dapat menjamin kesejahteraan mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat secara luas.⁸

Menurut pendapat Rudy Badrudin kesejahteraan merupakan kondisi yang menunjukkan keadaan hidup masyarakat yang dapat dilihat dari

⁷Rudiono D, dkk, "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SPR "Ngudi Rukun" di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri", *Science Contribution to Society Journal* 1 No. 1 (2021), 41.

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 2.

standar kehidupan masyarakat. Dengan sumber daya yang dimiliki mampu memaksimalkan tingkat kepuasan maka dapat dicapainya tingkat kesejahteraan yang tinggi.⁹

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰

Dari Undang-Undang diatas dapat dipahami bahwa tingkat kesejahteraan dinilai dari kemampuan seseorang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan material dan spritual. Kebutuhan material dapat dikaitkan dengan pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan juga kesehatan. Untuk kebutuhan spiritual yaitu dapat dikaitkan dengan pendidikan, keamanan dan juga ketentraman.

2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kehidupan yang nyaman secara finansial, fisik dan sosial, serta kesehatan yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar.
- b. Untuk dapat beradaptasi dengan baik khususnya dengan masyarakat dan lingkungan, misalkan dengan menimba dan meningkatkan taraf hidup yang memadai. Selain itu, schneiderman juga mengatakan tiga tujuan

⁹Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, 149.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

utama dari sebuah sistem kesejahteraan sosial sampai pada tingkat tertentu yang terlihat dalam program kesejahteraan sosial, yaitu:

1) Pemeliharaan Sistem

Menjaga dan mempertahankan keseimbangan nilai-nilai dan norma-norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang termasuk hal-hal terkait dengan makna dan tujuan hidup, motivasi untuk keberlangsungan hidup seseorang, kelompok maupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan kegiatan sistem kesejahteraan yaitu dilakukan dengan diadakan kegiatan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan juga kesanggupan untuk memakai sumber-sumber dan kesempatan yang ada dalam suatu masyarakat melalui informasi, nasihat dan juga bimbingan seperti bantuan sosial, penggunaan sistem rujukan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

2) Pengawasan Sistem

Dalam pengawasan sistem dilakukan dengan pengawasan secara efektif terhadap suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial. Kegiatan kesejahteraan sosial untuk menggapai tujuan tersebut yaitu meliputi kompensasi, sosialisasi, dan peningkatan kecakapan dalam menjangkau fasilitas-fasilitas untuk golongan masyarakat yang menunjukkan penyimpangan dalam tingkah laku.

3) Perubahan Sistem

Menciptakan suatu perubahan kearah yang lebih efektif untuk anggota masyarakat dalam menciptakan perubahan itu, sistem

kesejahteraan sosial yang merupakan alat untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan pembagian sumber-sumber secara pantas dan adil, dan penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil.¹¹

1. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), memberikan klasifikasi indikator keluarga sejahtera yang dapat dikategorikan sesuai dengan tingkat kesejahteraan. Berikut indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dengan variabel yang meliputi:

- a. Agama
- b. Sandang
- c. Pangan
- d. Papan
- e. Kesehatan
- f. Pendidikan
- g. Keluarga Berencana
- h. Penghasilan
- i. Interaksi dalam keluarga
- j. Interaksi sosial dengan lingkungan
- k. Informasi
- l. Peran dalam masyarakat¹²

¹¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 10

¹² BKKBN, *Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga* (Jakarta: Direktorat Pelaporan Statistik, 2016), 9.

Berdasarkan indikator-indikator diatas maka kesejahteraan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera

Sebuah keluarga dianggap prasejahtera jika salah satu dari lima indikator kebutuhan dasar keluarga (agama, sandang, pangan, papan dan kesehatan) belum terpenuhi.

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I

Keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota keluarga setidaknya makan dua kali sehari.
- 2) Keluarga mengenakan baju yang berbeda ketika di rumah, bekerja atau sekolah.
- 3) Rumah keluarga memiliki konstruksi yang kokoh.
- 4) Saat anggota keluarga ada yang sakit dibawa ke rumah sakit.
- 5) Ketika pasangan ingin menggunakan KB pergi ke pelayanan kontrasepsi.
- 6) Setiap anggota keluarga usia 7-15 tahun mengikuti program pendidikan.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga kebutuhan psikologis keluarga, seperti:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan sendiri-sendiri.
- 2) Makan daging, ikan atau telur setidaknya seminggu sekali.

- 3) Setiap anggota keluarga dalam setahun minimal mendapatkan satu pasang baju.
- 4) Luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi.
- 5) Selama tiga bulan terakhir, semua anggota keluarga baik-baik saja dan dapat melakukan bagian mereka dirumah.
- 6) Terdapat satu orang atau lebih keluarga yang bekerja untuk mencari nafkah.
- 7) Anggota keluarga usia 10 sampai 60 tahun dapat membaca dan menulis.
- 8) Pasangan usia subur yang telah memiliki anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, psikologis dan juga kebutuhan pengembangan dengan indikator-indikator berikut:

- 1) Keluarga berusaha untuk belajar lebih banyak tentang agama.
- 2) Keluarga menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk ditabung.
- 3) Minimal seminggu sekali keluarga makan bersama dan berkomunikasi satu sama lain.
- 4) Keluarga ikut aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat.
- 5) Koran, majalah, dan radio merupakan sumber informasi bagi keluarga.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera Plus III

Keluarga yang sudah mampu memenuhi kriteria keluarga sejahtera III, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga selalu rutin memberikan dukungan keuangan untuk acara sosial.
- 2) Beberapa keluarga berperan aktif dalam pengurusan organisasi ataupun lembaga masyarakat.¹³

Tabel 2.1
Indikator Tingkat Kesejahteraan

No	Indikator	Pra Sejahtera	Sejahtera tahap I	Sejahtera tahap II	Sejahtera tahap III	Sejahtera tahap III plus
1.	Agama	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Sandang	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Pangan	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Papan	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Kesehatan		✓	✓	✓	✓
6.	Pendidikan		✓	✓	✓	✓
7.	Keluarga Berencana		✓	✓	✓	✓
8.	Tabungan			✓	✓	✓
9.	Interaksi dalam keluarga				✓	✓
10.	Interaksi sosial dengan lingkungan				✓	✓
11.	Informasi				✓	✓
12.	Peran dalam					✓

¹³Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 14-15.

	masyarakat					
--	------------	--	--	--	--	--

Sumber Data: Data Diolah

2. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Fungsi kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan karena dampak dari perubahan sosio-ekonomi, dan menghindari terjadinya konsekuensi sosial yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan. Berikut adalah fungsi kesejahteraan masyarakat:

a. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial masyarakat memiliki tujuan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat agar menghindari dari masalah-masalah baru. Dalam masyarakat transisi upaya untuk mencegah dilakukan dengan kegiatan-kegiatan untuk membantu mewujudkan pola yang baru dalam sebuah hubungan sosial dan juga Lembaga sosial yang baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk menghilangkan kondisi kelemahan fisik, emosional dan sosial supaya orang yang memiliki masalah tersebut mampu berfungsi lagi dalam masyarakat.

c. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial masyarakat memiliki fungsi dalam memberikan tunjangan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengembangan dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*supportive*)

Fungsi penunjang meliputi kegiatan-kegiatan untuk membantu dalam mencapai suatu tujuan pada bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lainnya.¹⁴

3. Penyelenggaraan Kesejahteraan

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan beberapa program, sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Sosial

1) Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah untuk pemilihan dan mengembangkan keterampilan seseorang yang sedang mengalami disfungsi sosial agar mereka dapat memenuhi kewajiban sosialnya dengan baik.

2) Upaya yang diberikan rehabilitasi sosial yaitu melalui motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuh, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut.

b. Jaminan Sosial

1) Jaminan sosial yaitu adalah bentuk asuransi yang digunakan untuk menanggung fakir miskin, anak-anak yatim piatu yang terlantar, lansia yang terlantar, penyandang difabel, orang yang mengidap penyakit keras yang mengalami masalah sosial dan ekonomi agar dapat terpenuhinya kebutuhan dasar.

¹⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 12.

- 2) Jaminan sosial dalam bentuk tunjangan untuk menghargai perjuangan, pelopor kemerdekaan serta keluarga pahlawan atas semua jasanya.

c. Pemberdayaan Sosial

- 1) Pemberdayaan sosial dilakukan dengan memperdayakan seseorang, kelompok, dan juga masyarakat agar mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Bentuk pemberdayaan yaitu diagnosis dan memberikan motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan dan memberikan pendorong modal usaha.
- 2) Meningkatkan peran serta individu, lembaga dan sumber daya dalam penyelenggaraan sosial yang dilakukan dalam bentuk kelembagaan masyarakat, kemitraan dan penggalangan dana. Pemberdayaan dilakukan dengan melalui peningkatan keinginan dan kemampuan, pendalaman potensi dan sumber daya, pendalaman nilai-nilai dasar, pemberian akses dan bantuan usaha.

d. Perlindungan Sosial

- 1) Perlindungan sosial yaitu untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan rentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan perlindungan sosial yaitu melalui bantuan sosial dan hukum.¹⁵

C. Kesejahteraan Dalam Islam

Islam telah memberikan petunjuk dan aturan yang digunakan sebagai tumpuan dalam kehidupan yang disebut syariah yang menjadi norma-norma perilaku yang dimaksudkan untuk memajukan tujuan strategisnya. Tujuan-

¹⁵ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa* (Jakarta: Amzah, 2016), 110-115.

tujuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tentang kesejahteraan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam memberikan penjelasan tentang konsep kesejahteraan ini terikat pada terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual.¹⁶ Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan finansial bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang dalam hidup karena harta hanyalah sarana untuk tujuan beribadah kepada Allah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh, jika manusia melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari melakukan apa yang dilarang maka Allah SWT akan memberikan kesejahteraan bagi mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (10)

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur.” (QS. Al-A'raf:10)¹⁷

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan-Nya. Bersyukur atas nikmat itu adalah jalan untuk memperoleh kesejahteraan dalam bentuk bumi yang diciptakan-Nya untuk kita tinggal, bercocok tanam dan memanfaatkan hasil tanam untuk makanan agar kita dapat hidup.¹⁸

Menurut Umar Chapra kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, sebagai berikut:

¹⁶Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014)

¹⁸Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Justitia Islamica* 11 No. 1 (2014), 29.

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu suatu keadaan kebahagiaan yang lengkap dan harmonis yang ditandai dengan kepuasan kebutuhan material dan spiritual. Karena manusia adalah kombinasi dari tubuh dan pikiran, oleh karenanya kita membutuhkan keadaan yang utuh dan harmonis untuk benar-benar bahagia. Orang yang bahagia mencapai keseimbangan yang baik antara diri mereka dan lingkungan sosial mereka.
2. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di dunia tetapi juga di akhirat. Memiliki materi di dunia yang cukup adalah sarana untuk mencapai tujuan untuk mendapatkan kehidupan di akhirat yang cukup. Jika prasyarat ini tidak dapat dicapai, maka sangat penting untuk mengutamakan kesejahteraan di akhirat, karena kesejahteraan di akhirat jauh lebih penting daripada keberadaan fisik kita yang sementara di dunia.¹⁹

Sementara itu, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat tergantung pada pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama (*din*), jiwa (*al-nafs*), intelektual atau akal (*al-aql*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*). Dalam kerangka individu dan masyarakat, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya sebagai pemenuhan tiga jenis kebutuhan: pertama, kebutuhan dasar (*dharuriyat*) yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi manusia yang meliputi lima kebutuhan dasar pemeliharaan; kedua, kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*) dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan dan meniadakan kesulitan yang dapat mendatangkan bahaya; dan ketiga, kemewahan (*tahsiniyat*) yaitu

¹⁹Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3 No. 5 (2016 (2016), 394.

melakukan kebiasaan yang baik untuk menyempurnakan kehidupan manusia.²⁰

Lima tujuan syariah yang dikenal dengan *maqashid syariah* yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam berkeyakinan dan beribadah, setiap manusia berhak atas agamanya dan tidak boleh memaksanya untuk meninggalkan agamanya dengan berpindah dari keyakinannya. Dalam memelihara agama umat muslim dapat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban agama dengan mengamalkan rukun islam dan juga meyakini rukun iman seperti melaksanakan sholat, zakat, puasadan doa

2. Memelihara Jiwa

Hak paling pertama dalam islam yang harus diperhatikan yaitu hak untuk hidup dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya karena nyawa manusia sangat berharga dan wajib menjaga jiwanya sendiri-sendiri. Dalam memelihara jiwa yang paling utama yaitu memenuhi kebutuhan makan dan minum, karena jika tidak dapat terpenuhi maka akan dapat mengancam jiwa manusia.

3. Memelihara Akal

Sumber pengetahuan manusia adalah akal, dengan akal manusia menjadi sempurna dan berbeda dari makhluk lain. Untuk menjaga akal manusia diperintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan untuk

²⁰Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 62.

mendapatkan wawasan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal dan mengancam kehidupan manusia namun manusia akan mengalami kesulitan dalam hal ilmu pengetahuan.

4. Memelihara Keturunan

Islam mengajurkan manusia untuk selalu menjaga anak-anak keturunannya dengan baik. Untuk menjaga keturunan akan mendapatkan kehidupan yang baik maka harus bekerja mencari nafkah agar kebutuhan keturunannya tercukupi.

5. Memelihara Harta

Manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi untuk menjaga eksistensinya. Islam sudah menganjurkan umat manusia untuk menjaga harta dari sesuatu yang haram. Dalam memelihara harta manusia harus dengan syarat mencari harta yang halal, dan digunakan untuk hal yang halal seperti dikeluarkannya harta untuk orang yang berhak menerimanya.²¹

²¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah* (Rawangmangun: Kencana, 2019), 6-8.